



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

MULAI BERBUNGA: Warga mengunjungi kawasan wisata kebun bunga amaryllis di Salam, Patuk, Gunungkidul, Kamis (2/9). Pengelola mengatakan, bunga amaryllis di kawasan itu mulai berbunga sejak beberapa hari terakhir, namun belum dibuka untuk wisata menyusul penerapan PPKM di Yogyakarta serta guna menekan penyebaran Covid-19.

MINAT TINGGI JADI LAHAN BASAH OKNUM

Ulah Calo CPNS Diwaspadai

JAKARTA (KR) - Seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi calon abdi negara telah dimulai hari ini, Kamis (2/9). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaannya harus konsisten dan sesuai aturan, salah satunya bebas calo.

"Tiap tahun pasti ada calo. Hati-hati terhadap calo!" tegas Menteri Tjahjo saat memantau pelaksanaan SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (2/9).

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat hal tersebut sebagai 'lahan basah' bagi sejumlah oknum untuk mencari korban, terutama di masa pengadaan ASN seperti saat ini. Oleh karena itu, Menteri Tjahjo juga meminta ke-

pada kantor regional dan unit pelaksana teknis (UPT) BKN untuk turut mengingatkan kepada peserta, orang tua, dan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang dilakukan calo.

"Sudah ditekankan ke semua teman-teman di daerah pelaksana bahwa (pelaksanaan seleksi) harus konsisten, hati-hati dalam menjelaskan serta berikan pemahaman secara jelas, adil, dan akurat," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN Bima Haria

Wibisana turut menjelaskan terkait vaksinasi dan swab RT-PCR atau rapid test antigen yang disyaratkan kepada para peserta SKD. Dikatakannya, syarat vaksin setidaknya dosis pertama hanya dilakukan bagi peserta di Jawa, Madura, Bali. Sedangkan di daerah lain, ditentukan oleh Satgas Covid-19-nya masing-masing.

Untuk syarat swab RT-PCR atau rapid test antigen, wajib dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di saat seleksi dilaksanakan. "Kami menyadari vaksin itu belum merata di seluruh Indonesia. Tapi kalau swab itu wajib karena kita tidak hanya menjaga peserta, tapi juga panitianya," jelasnya.

Ia menambahkan, di beberapa kabupaten/kota yang melakukan pengadaan ASN membuka puse-

kesmas agar bisa digunakan untuk swab antigen gratis dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan kartu tanda penduduk (KTP). "Jadi mereka (pemerintah daerah) ingin melayani masyarakat sebaik mungkin sehingga mereka dibebaskan untuk antigen," pungkasnya.

Pelaksanaan SKD CPNS 2021 telah dimulai pada 2 September 2021 dan dilaksanakan di Kantor Regional BKN, Kantor UPT BKN, serta di beberapa titik lokasi mandiri BKN yang tersebar di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan SKD transparan dan akuntabel, BKN juga menyediakan kanal agar peserta dan masyarakat umum dapat melihat live score para peserta SKD CPNS 2021 di kanal YouTube Official CAT BKN. (Ati)-f

ngemban amanah. Ia mengatakan, perlu dipahami dan disadari, meskipun wakil rakyat memiliki legitimasi untuk mengusulkan dan melakukan perubahan UUD 1945 secara normatif, namun legitimasi moral tetap berada pada rakyat sebagai pemangku utama dalam prinsip negara demokrasi.

Anwar meminta agar para wakil rakyat memiliki kepekaan moral dan sensitivitas sosial mengenai wacana tersebut.

"Para wakil rakyat yang saat ini tengah mengemban amanah dituntut memiliki kepekaan moral dan sensitivitas sosial agar nilai, niat dan upaya untuk melakukan perubahan dapat dipahami oleh seluruh warga negara," ujarnya.

Ketua MK ini mengajukan beberapa pertanyaan yang muncul, baik secara teoretis maupun praktis, jika salah satu kehendak dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah untuk melahirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). (Ant)-d

Saipul Jamil Bebas Murni

JAKARTA (KR) - Selebritas Saipul Jamil bebas murni dari Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta Timur. Saat keluar dari Lapas, Kamis (2/9) Saipul Jamil disambut perwakilan keluarga, kerabat dan tim kuasa hukumnya yang telah menanti sejak pagi. "Perasaannya bahagia banget terus terang nyawa belum ngumpul kayak orang baru bangun tidur, ngelindur gitu," kata Saipul Jamil saat keluar dari Lapas Kelas I Cipinang.

Ia mengakui, hukuman penjara yang dijalaninya membuatnya sedikit trauma. Meski demikian ia menganggapnya sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidupnya. "Pasti trauma, yang jelas ini pengalaman hidup dan pelajaran hidup. Siapa sih yang mau masuk penjara?," katanya.

Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Tonny Nainggolan mengungkapkan, Saipul Jamil selama dipenjara mendapatkan sebanyak 30 bulan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Selama dipenjara, Saipul Jamil juga dikenal dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga binaan Lapas Kelas 1 Cipinang lainnya.

"Yang bersangkutan kami kenal *low profile* bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan warga binaan lain. Beliau juga aktif dalam pembinaan musik di Lapas Kelas 1 Cipinang dan kegiatan ibadah dari agama yang dianut," ujar Tonny. (Ati)-d

KEMENDAGRI INGATKAN PEMDA Perhatikan Poin Krusial Penyusunan APBD 2022

JAKARTA (KR) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan enam poin krusial dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/9), mengatakan hal itu sehubungan dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD serta, Surat Edaran (SE) No 910/4350/SJ pada 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Penyusunan APBD 2022, yang ditujukan kepada gubernur, bupati, walikota di seluruh Indonesia. "Dalam SE ini, ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan dan ini merupakan arahan dari Bapak Presiden untuk bisa semua pemda provinsi, kabupaten/kota mengetahui terkait penyusunan anggaran 2022," tutur Hudori.

Ia mengatakan 6 arahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan APBD 2022, yaitu, pertama, APBD 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan

produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini, difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan produktivitas.

Kedua, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar mengubah budaya kerja serta fokus pada budaya kerja baru, seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ketiga, penyusunan program, kegiatan, sub-kegiatan dan anggaran dalam APBD 2022 dilakukan efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian. "Tidak bersifat rutinitas ini sering ditekankan Bapak Presiden, tidak fotokopi (program/kegiatan yang sifatnya sama dengan sebelumnya, itu-itu saja atau tidak ada variasinya)," ucapnya. (Ant)-d

YOGYA (KR) - Meski penambahan kasus harian terkonfirmasi Covid-19 mulai menurun, namun angka kematian di DIY masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan banyak pasien terlambat berobat ke rumah sakit dan lebih memilih melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah. Sementara keterbatasan fasilitas di rumah menjadikan pasien tidak bisa tertangani dengan baik. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian semua pihak agar tidak terulang.

"Saya minta bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19 segera ke rumah sakit agar bisa ditangani dengan baik. Karena selama ini banyak pasien yang datang ke RS kondisinya sudah parah, sehingga mereka terlambat ditangani dan akhirnya meninggal dunia. Padahal jika sejak awal mereka langsung ke RS, kemungkinan penanganannya bisa lebih maksimal," kata Sekda DIY K Baskara Aji di kantornya, Kamis (2/9).

Baskara Aji mengungkapkan, apabila ada warga yang sudah dinyatakan positif Covid-19, jangan langsung memutuskan untuk melakukan iso-

man. Seandainya mereka merasa ragu-ragu untuk berobat, sebaiknya datang ke rumah sakit. Nanti biar RS yang memberikan rekomendasi apakah bisa melakukan isoman di rumah, isolasi terpadu (isoter) di shelter, atau harus dirawat di rumah sakit. Jangan sampai pasien mengambil keputusan sendiri yang justru bisa memperburuk kondisinya. Apalagi saat ini bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit di DIY cenderung turun, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk langsung ke RS ketika terpapar Covid-19.

"Saya menayakan ke rumah sakit rata-rata karena pasien datang ke rumah sakit kondisinya sudah berat (parah), jadi mereka telat ditangani. Untuk itu pasien jangan memutuskan sendiri, karena bisa berakibat fatal," ungkapnya.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih melaporkan, kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY per Kamis bertambah 384 kasus menjadi 150.772. Pasien sembuh bertambah 1.043 menjadi 134.849 dan

pasien meninggal bertambah 30 menjadi 4.905 kasus.

Untuk meningkatkan cakupan testing sekaligus meringankan beban masyarakat, Pemerintah menurunkan batas tarif tertinggi rapid test antigen dengan harapan tingkat testing naik, sebagai salah satu langkah penting dalam menangani pandemi Covid-19. "Harga antigen yang lebih murah mendorong peningkatan testing, sekaligus meringankan beban masyarakat yang butuh swab test mandiri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Tarif tertinggi untuk tes antigen saat ini Rp 99.000 untuk area Jawa-Bali dan Rp 109.000 untuk luar Jawa-Bali. Sebelumnya, batas tarif tertinggi tes antigen Rp 250.000 (Jawa) dan Rp 275.000 (luar Jawa).

Penurunan harga tes antigen merupakan evaluasi terhadap Surat Edaran Irjen Pelayanan Kesehatan HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab, yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. (Ria/Ira/San)-d

JANGAN SAMPAI TIMBULKAN MASALAH BARU

Pandemi, Limbah Medis Meningkat 30 Persen

JAKARTA (KR) - Permasalahan baru di bidang lingkungan dan kesehatan akibat potensi lonjakan limbah medis terkait pandemi Covid-19 perlu diantisipasi. Untuk itu Pemerintah memperbanyak fasilitas pengelolaan limbah medis berupa insinerator dan merelaksasi izin pengelolaan limbah medis secara mandiri untuk fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

"Pemerintah memberi perhatian serius pada melonjaknya limbah medis agar tak menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan baru bagi masyarakat," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam keterangan persnya, Kamis (2/9).

Menkominfo mengungkapkan, jumlah limbah medis meningkat hingga 30 persen setiap harinya selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, rata-rata limbah medis mencapai 400 ton perhari. Kini, rata-rata limbah medis meningkat menjadi 520

ton perhari.

"Dari total limbah medis yang ada saat ini, masker menjadi penyumbang paling besar. Kita tahu masker digunakan secara umum baik di lingkungan penanganan Covid-19 ataupun bukan. Setidaknya, 16 persen limbah medis saat ini berasal dari masker," ujar Johnny.

Menkominfo memastikan Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi hal itu, salah satunya dengan membangun insinerator di berbagai daerah. Pembangunan insinerator yang diinisiasi sejak tahun lalu itu, telah berkontribusi dalam pemusnahan 150 ton limbah medis perhari.

"Pemerintah memahami betul bahwa ada risiko ekologis dan lingkungan yang tidak boleh kita lupakan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah bertekad untuk meningkatkan jumlah insinerator di berbagai daerah,"

katanya.

Dikemukakan, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi relaksasi kebijakan terutama untuk Fasyankes yang belum memiliki izin operasi pengelolaan limbah medis. Pemerintah memberikan dispensasi operasi dengan syarat insinerator suhu 800 derajat Celsius dan memberikan supervisi atas pengelolaan insinerator tersebut.

Pemerintah, lanjut Menkominfo, juga terus memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis, termasuk dengan mengedukasi terkait hal ini. Menurutnya, kesadaran semua pihak untuk membuat tidak membuang sampah medis sembarangan harus ditingkatkan.

Johnny mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan tidak sembarang membuang limbah medis. (San)-d



KR-Ngabdul Wakid

PENYERAHAN BANTUAN PEMBACA 'KR': Sebanyak 66 seniman musik Bantul yang tergabung dalam RVV Musik mendapat bantuan paket bako dari Dompot 'KR'. Menurut Yannes Jana Kelen, salah satu musisi, sejak terjadi pandemi banyak seniman musik yang kesulitan ekonomi. Sebab mereka kehilangan banyak job, baik di hotel-hotel maupun berbagai event. "Karena itu kami mengucapka bantuan terima kasih atas perhatian 'KR' ini," kata Yannes didampingi Andhito Utama N.